

STUDI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PADAT RUMAH TANGGA DI KOTA MEULABOH, KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM¹⁾

(*Study of Household Solid Waste Management in Meulaboh City,
West Aceh District, Nanggroe Aceh Darussalam Province*)

Maryama Solehati, Iswandi Anas Chaniago²⁾, dan M. Parulian Hutagaol²⁾

ABSTRACT

The aim of this research was to study the system of waste management in Meulaboh City, role of government and community in household waste management and the factors influenced role of household waste management by community. The system of household solid waste management conducted by the government of Meulaboh City was direct dumping process (the wasted carry away from the house to the final dumping). Since there are only seven operational garbage truck per day that only 70% of wasted could carry away, whereas 30% of the remainder couldn't carry away. The method use in final dumping was open dumping and continuing with burning. The hole of waste management by community was included in good category, eventough there was a weaken in level of participatory in the companionship about environment sanitary. The role of waste management by government was included in moderate category, with the weakness in cleaning labour performance, lack of temporary dumping and garbage can that meet the requisite, as well as the unfrequently of elucidation. Income and age of respondents influenced significantly ($p < 0.1$) on household solid management conducted by the community.

Key words: management, household solid waste, final dumping, temporary dumping

PENDAHULUAN

Salah satu masalah lingkungan hidup di daerah perkotaan adalah masalah sampah. Sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis (karena kotoran manusia tidak termasuk di dalamnya) dan umumnya bersifat padat (Azwar, 1990). Timbulnya masalah lingkungan biasanya disebabkan oleh meningkatnya kegiatan manusia, baik produksi maupun konsumsi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penambahan jumlah penduduk, perubahan kualitas hidup, gaya hidup, dan perilaku masyarakat.

Pelaksanaan Program Kebersihan di Kota Meulaboh berpedoman pada Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Barat No. 2 Tahun 1999 tentang Kebersihan dan Keindahan Kota. Perda tersebut menetapkan bahwa pengaturan serta pengelolaan kebersihan dan keindahan dalam Daerah Tingkat II Aceh Barat

¹⁾ Bagian dari tesis penulis pertama, Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana IPB

²⁾ Berturut-turut Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing

ditangani langsung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Meulaboh, kemudian Dinas Kebersihan dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan Camat dan Keucik atau Kepala Desa serta Dinas jawatan lainnya yang ada hubungannya dengan terpeliharanya kebersihan lingkungan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Meulaboh dalam pengelolaan kebersihan, di antaranya, dengan melakukan pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah. Namun, sesuai laporan Dinas Kebersihan Kota Meulaboh tahun 2003, timbulan sampah yang tidak mampu ditangani sekitar 1415.4 m³ per bulan atau 30% dari total timbulan sampah.

Jumlah sampah yang tidak tertangani atau tidak terangkut paling banyak berasal dari pemukiman penduduk atau dari sampah rumah tangga. Penumpukan sampah dapat menimbulkan dampak negatif, seperti media berkembang biak dan mencari makan lalat atau tikus, dan akhirnya menjadi tempat berkembang bibit penyakit, kontaminasi air minum, menghasilkan bau yang tidak sedap, dan daerah yang becek, menyebabkan banjir, serta mengganggu kebersihan dan pemandangan.

Masalah kebersihan lingkungan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Meulaboh, khususnya masalah sampah pemukiman atau sampah rumah tangga, sangat memerlukan disiplin sosial dari masyarakat. Dalam kaitannya dengan program kebersihan, disiplin sosial yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat dalam membersihkan lingkungan, terutama dalam membuang sampah sesuai dengan cara yang telah ditetapkan Dinas Kebersihan Kota Meulaboh.

Pelaksanaan program kebersihan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah rumah tangga, merupakan salah satu kebutuhan pelayanan di Kota Meulaboh. Agar pengelolaan sampah berhasil, diperlukan dukungan dari pemerintah yang meliputi penyediaan tenaga pengelola sampah, sarana dan prasarana, dan penyuluhan tentang kebersihan. Di samping itu, diperlukan pula peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah seperti partisipasi dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari rumah ke tempat penampungan sementara (TPS), kesadaran membayar retribusi dan tumbuhnya persepsi yang benar terhadap peraturan kebersihan yang ada. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subyek (pelaku) dalam sistem pelayanan kebersihan, khususnya dalam penanggulangan masalah sampah.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) apakah pola pengelolaan sampah pemukiman/sampah rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Meulaboh sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan pemukiman yang ada?; (2) sejauh mana peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah padat rumah tangga di Kota Meulaboh?; (3) faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pengelolaan sampah padat rumah tangga oleh masyarakat di Kota Meulaboh?.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kajian yang mendalam tentang pola pengelolaan sampah, khususnya sampah pemukiman/sampah rumah tangga, tingkat partisipasi masyarakat, dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pengelolaan sampah oleh masyarakat dalam pelaksanaan kebersihan lingkungan di Kota Meulaboh.

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- (1) menelaah pola pengelolaan sampah pemukiman/sampah rumah tangga yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Meulaboh;
- (2) menelaah sampai sejauh mana peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah padat rumah tangga di Kota Meulaboh;
- (3) mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pengelolaan sampah padat rumah tangga oleh masyarakat di Kota Meulaboh.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling* (sengaja) sehingga dipilih satu kecamatan dari sembilan kecamatan yang ada di Kota Meulaboh, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, dengan pertimbangan kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk paling banyak dan merupakan pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan pusat pendidikan di Kota Meulaboh Aceh Barat.

Penentuan kelurahan sampel dilakukan secara *stratified random sampling* berdasarkan kepadatan penduduk sehingga diperoleh tiga kelurahan dari 20 kelurahan yang ada, yaitu kelurahan padat (> 437 jiwa), kelurahan sedang (104 - 437 jiwa), dan kelurahan jarang (< 104 jiwa) (sesuai dengan kepadatan jumlah penduduk di Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat). Penelitian ini berlangsung selama delapan bulan, yaitu dari bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2004.

Pengambilan Sampel dan Pengumpulan Data

Pengambilan sampel dilakukan secara acak pada 3 kelurahan terpilih, dengan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel pada masing-masing kelurahan ditentukan secara proporsional, yaitu kelurahan padat (Kelurahan Ujong Baroh 840 jiwa) 40 responden, kelurahan sedang (Kelurahan Kampung Belakang 289 jiwa) 30 responden, dan kelurahan jarang (Kelurahan Pasar Aceh 92 jiwa) 20 responden. Objek yang menjadi sampel adalah kepala keluarga/ibu RT atau anggota keluarga lainnya yang telah dewasa dan dianggap mewakili keluarga, dengan jumlah keseluruhan 90 orang.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei diskriptif, yaitu melalui wawancara, penelusuran pustaka, dan pengamatan lapangan. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara kepada kepala keluarga yang dijadikan sampel dengan menggunakan kuesioner. Di samping itu, data primer juga diperoleh melalui wawancara mendalam kepada beberapa informan kunci (*key person*) seperti petugas Dinas Kebersihan, camat, lurah atau kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat.

Data sekunder diperoleh melalui laporan dan data pada dinas instansi terkait di lingkup Pemerintah Kota Meulaboh, seperti Dinas Kebersihan, Bappeda, dan Dinas Kimpraswil serta kajian literatur. Pengamatan lapangan dilakukan di TPS dan TPA.

Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dari hasil penelitian ini menggunakan paduan pendekatan antara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dipakai agak umum untuk berbagai pendekatan atau teknik pengumpulan data karena faktor-faktor subjektif dari penelitian memainkan peranan yang penting (Ihromi, 1982). Dalam pendekatan kuantitatif data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan tabel silang, selanjutnya diproses dengan komputerisasi menggunakan program SPSS.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik deskriptif dan analisis statistik untuk menguji hipotesis yang diajukan. Data yang terkumpul disusun dalam tabulasi, dengan cara mempertimbangkan *range* (nilai terendah dan nilai tertinggi) dari distribusi nilai, dengan seluruh jawaban responden dibagi dalam bentuk kategori/interval kelas.

Untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel bebas dengan variabel tidak bebas, dilakukan uji statistik X^2 (khi kuadrat) (Siegel, 1988). Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan dan pengaruh antara faktor-faktor pada variabel bebas (X) dengan variabel tidak bebas (Y) dilakukan uji korelasi Spearman dan analisis linear berganda (Siegel, 1988).

HASIL DAN PEMBAHASAN

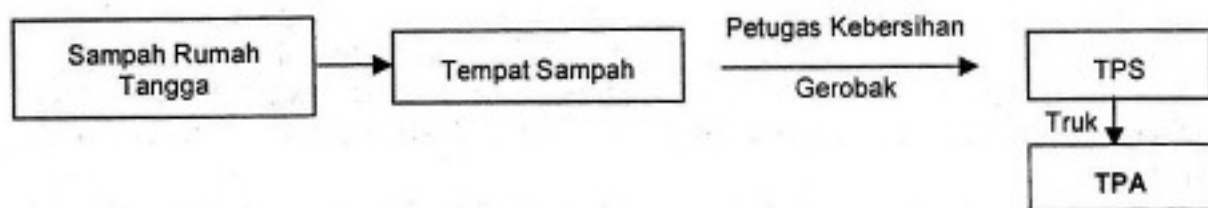
Pengelolaan Sampah Padat RT di Kota Meulaboh

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Kebersihan, Penertiban, dan Lingkungan Hidup Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, jumlah sampah terdiri dari sampah domestik (RT) 120 908 m³/hari atau 75% dan sampah nondomestik (pasar, terminal, dll) 36.27 m³/hari atau 30%.

Pengumpulan sampah yang baik ditujukan untuk melestarikan (melindungi) lingkungan dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah dan juga untuk menghindarkan manusia dari gangguan terhadap kesehatan dan sebagainya, di Indonesia pengelolaan sampah merupakan usaha pemerintah yang ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Ketertiban. Sampai saat ini Kabupaten Aceh Barat yang merupakan ibukota Meulaboh, tempat pengumpulan sampah sementara (TPS), belum dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan Perda No.2 Tahun 1999. Padahal dalam Perda No.2 Tahun 1999 telah dijelaskan tahapan kegiatan pengelolaan sampah, yang mencakup tahapan sebagai berikut: masyarakat membuang sampah ke tong sampah, selanjutnya petugas kebersihan yang berasal dari masyarakat mengumpulkan sampah dari tong-tong sampah dengan menggunakan gerobak dan membawanya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Sampah yang telah terkumpul pada TPS-TPS yang tersedia lalu diangkut Petugas Dinas Kebersihan dengan truk menuju Tempat Pembuangan Akhir, tempat sampah yang terkumpul akan dibakar. Secara rinci pola pengelolaan sampah di Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, disajikan pada Gambar 1.

Pengelolaan TPA yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan hanya berupa penimbunan dan belum ada pemisahan jenis sampah organik dan nonorganik. Jumlah truk sampah yang beroperasi adalah 7 buah/hari, masing-masing truk mengangkut sampah dengan 3 kali angkut per harinya. Kapasitas truk per sekali angkut adalah $\pm 3 \text{ m}^3$ sampah. Dalam satu hari jumlah sampah yang terangkut adalah $3 \times 7 \times 3 \text{ m}^3 = \pm 60 \text{ m}^3$ sampah/hari. Tidak semua sampah dapat terangkut

oleh truk milik dinas kebersihan. Untuk Kota Meulaboh hanya 70% sampah yang mampu diangkut oleh armada kebersihan, sedangkan sisanya yakni 30% tidak dapat terangkut.



Gambar 1. Pola pengelolaan sampah di Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat

Pembuangan sampah secara terbuka (*open dumping*) dan pembakaran sampah dikenal sejak dahulu tetapi pembuangan dan pembakaran sampah belum dibutuhkan secara sistematis, masih banyak sampah-sampah dijumpai di jalan-jalan dan selokan-selokan di Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, oleh karena kurangnya tenaga pengelola sampah dan minimnya alat pengangkut sampah.

Penertiban dan lingkungan hidup sangat luas dan belum seluruhnya terlayani oleh Dinas Kebersihan, di antaranya, banyak jalan-jalan yang belum terjangkau kebersihannya baik menyangkut dengan kebersihan riol, saluran drainase maupun lueng induk. Ini semuanya disebabkan oleh masih kurangnya petugas pembersih dan sarana yang belum memadai, yaitu armada truk sampah sebanyak 9 unit dan 1 unit mobil tinja serta 1 buah bulldozer dengan kekuatan petugas 105 orang.

Karakteristik Sosial Ekonomi

Sebagian besar (65.6%) responden mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, yakni hanya tamat SD. Di samping itu, terdapat sebanyak 18.9% responden tidak pernah mengecap pendidikan formal. Data tersebut mengindikasikan relatif rendahnya tingkat pendidikan responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Umur responden dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok, yakni muda (< 36 tahun), sedang (36-49 tahun), dan tua (> 49 tahun). Pengelompokan umur tersebut didasarkan pada penjumlahan nilai rata-rata umur seluruh responden dengan setengah nilai simpangan bakunya. Proporsi umur responden pada ketiga kelompok ternyata menyebar secara merata, yakni masing-masing 33.3%.

Lebih dari setengah (55.5%) responden mempunyai jumlah anggota keluarga 4 - 6 orang atau keluarga sedang. Sisanya sebanyak 27.8% termasuk keluarga kecil (< 4 orang) dan hanya 16.7% responden yang tergolong keluarga besar (> 6 orang).

Sebanyak 41.1% responden tergolong berpendapatan sedang (Rp 143 361 - Rp 317 437), sedangkan sisanya mempunyai pendapatan yang rendah (34.4%) (<Rp 143 361) dan tinggi (24.4%) (> Rp 317 437).

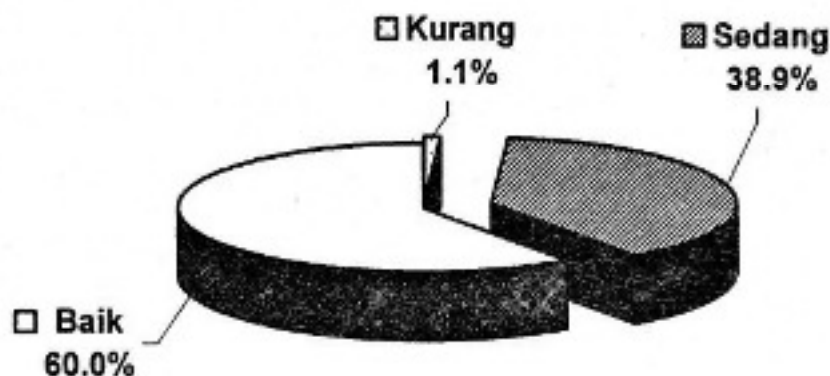
Peran Pengelolaan Sampah oleh Masyarakat

Partisipasi masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat di sini dapat diartikan sebagai tingkat keterlibatan masyarakat secara sadar dan spontan disertai tanggung jawab dalam mencapai tujuan program kebersihan, yaitu pengelolaan sampah rumah tangga. Dengan demikian, masyarakat diharapkan untuk ikut serta dalam pelaksanaan program kebersihan, khususnya kegiatan pengelolaan sampah padat rumah tangga.

Dalam penelitian ini, yang menjadi indikator tingkat partisipasi adalah kepemilikan tempat sampah di rumah, cara memperlakukan sampah di rumah sehari-hari, keikutsertaan responden dalam kegiatan kerja bakti/gotong-royong membersihkan lingkungan, reaksi terhadap halaman kotor/sampah berserakan, reaksi responden terhadap orang yang membuang sampah di sembarangan tempat, kemauan responden membayar retribusi sampah, kehadiran responden dalam rapat/pertemuan mengenai kebersihan lingkungan, dan keterlibatan responden dalam melaksanakan pemeliharaan/ membersihkan saluran/got.

Untuk mengetahui bagaimana kriteria partisipasi responden dalam pengelolaan sampah secara umum, skor dari setiap *item* pertanyaan partisipasi dikompositkan. Hasil pengategorian skor menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah padat rumah tangga sudah tergolong baik, yang terlihat dari cukup tingginya (60.0%) persentase responden yang terklasifikasi baik (Gambar 2). Sisanya, yakni 38.9% responden, tergolong dalam partisipasi sedang. Hanya 1.1% responden yang tergolong kurang dalam partisipasi pengelolaan sampah. Salah satu hal yang masih harus mendapat perhatian terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah keikutsertaan dalam rapat/pertemuan mengenai kebersihan lingkungan.

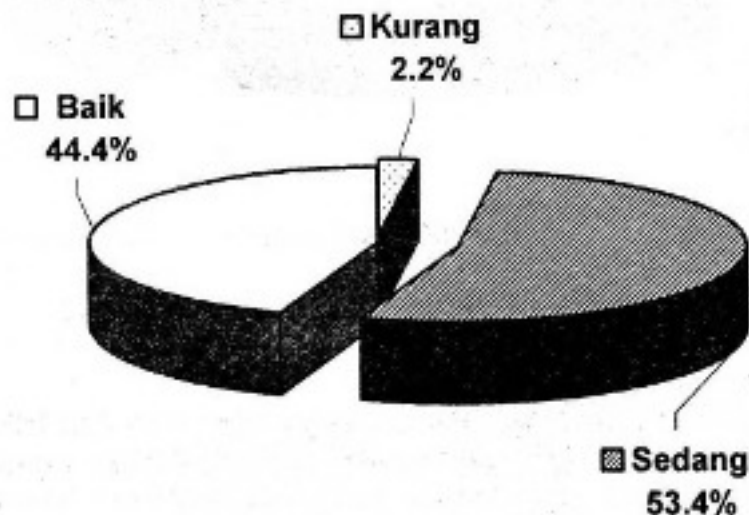


Gambar 2. Sebaran kategori partisipasi masyarakat

Masalah kebersihan lingkungan merupakan masalah yang kompleks, erat kaitannya dengan tata kehidupan dan kebiasaan masing-masing warga baik sebagai individu maupun masyarakat dalam lingkungannya. Lingkungan pemukiman yang bersih, tertib, indah dan sehat tidak akan berhasil bila masyarakat tidak ikut berpartisipasi. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam program kebersihan perlu ditumbuhkan dan digerakkan (Salim, 1993).

Persepsi masyarakat tentang peraturan kebersihan

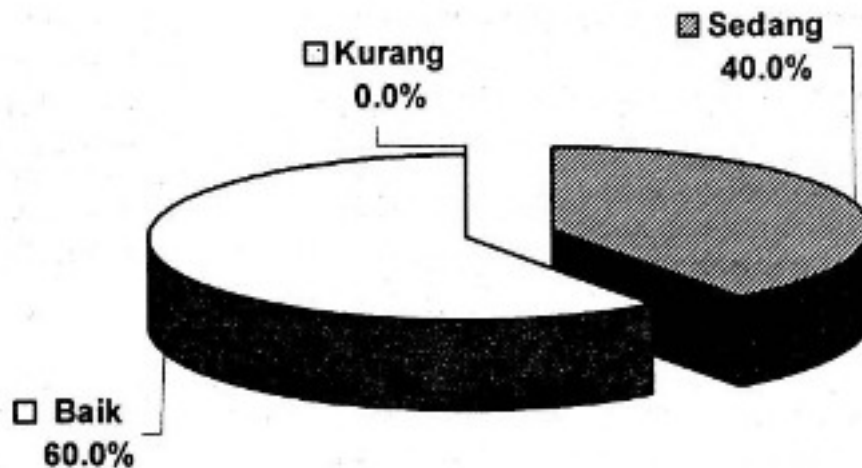
Untuk mengetahui bagaimana kriteria persepsi responden terhadap peraturan kebersihan secara umum, skor dari setiap *item* pertanyaan persepsi dijumlahkan. Hasil pengategorian skor menunjukkan bahwa lebih dari setengah (53.4%) responden mempunyai persepsi tentang peraturan kebersihan yang masuk dalam kategori sedang (Gambar 3). Sisanya termasuk dalam kategori baik (44.4%) dan kurang (2.2%). Persepsi dan kesadaran masyarakat yang benar terhadap perlunya pengelolaan sampah dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan sampah (Lawrance, 1989).



Gambar 3. Sebaran kategori persepsi tentang peraturan kebersihan

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kriteria pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat secara umum baik dalam bentuk aktif berupa partisipasi dalam pengelolaan sampah maupun pasif, yakni dari persepsi responden terhadap peraturan kebersihan, skor partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan persepsi masyarakat terhadap peraturan kebersihan dijumlahkan. Kemudian dilakukan pengategorian skor pengelolaan sampah oleh masyarakat menjadi 3 kriteria, yakni kurang, sedang, dan baik.

Hasil pengategorian skor menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sebagian besar (60.0%) sudah termasuk dalam kategori baik (Gambar 4). Sisanya, yakni 40.0% responden, masuk kategori pengelolaan sampah yang sedang. Dengan demikian, secara umum pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sudah cukup memadai dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

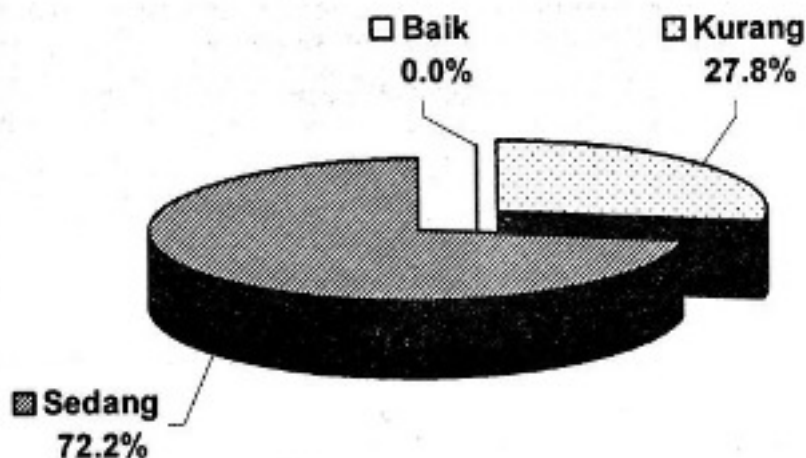


Gambar 4. Sebaran kategori pengelolaan sampah oleh masyarakat

Peran Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah

Tenaga pengelola sampah

Untuk dapat menyimpulkan penilaian responden terhadap tenaga pengelola sampah, skor dari semua *item* pertanyaan tentang tenaga pengelola sampah dijumlahkan. Selanjutnya skor tenaga pengelola sampah menurut pandangan responden dikategorikan menjadi tiga kelompok, yakni kurang, sedang dan baik. Hasil pengategorian skor menunjukkan tidak ada responden yang pandangannya tentang tenaga pengelola sampah yang masuk kategori baik. Umumnya, persepsi responden tentang tenaga pengelola sampah tergolong sedang, yang ditunjukkan dengan persentase yang tinggi, yakni 72.2% (Gambar 5). Berdasarkan penilaian responden terhadap tenaga pengelola sampah, yang masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah adalah rendahnya kinerja petugas kebersihan. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, salah satu langkah strategis yang diambil oleh Dinas Kebersihan dan Penertiban Kabupaten Aceh Barat adalah menambah personal yang dapat memenuhi muatan tugas (Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, 2002).

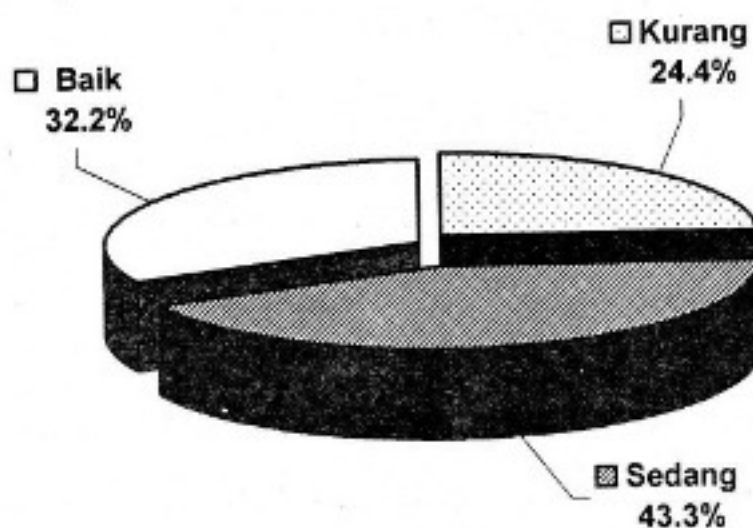


Gambar 5. Sebaran kategori tenaga pengelola sampah

Sarana dan prasarana

Pengelompokan skor sarana dan prasarana yang dibagi menjadi tiga, yakni kurang, sedang, dan baik, menghasilkan persentase dengan urutan kategori sedang (43.3%), baik (32.2%), dan kurang (24.4%) (Gambar 6). Sarana yang harus ditambah oleh pemerintah adalah TPS yang menurut masyarakat masih sangat kurang. Di samping itu, pengadaan tong-tong sampah yang memenuhi syarat harus diupayakan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Penertiban Kabupaten Aceh Barat Tahun 2002, salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam waktu 1-5 tahun mendatang adalah menambah sarana dan prasarana kebersihan serta penggantian dan perbaikan sarana yang telah rusak (Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, 2002).



Gambar 6. Sebaran kategori sarana dan prasarana kebersihan

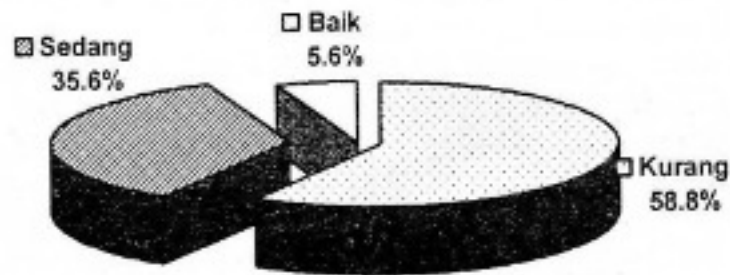
Penyuluhan kebersihan lingkungan

Penyadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dapat dilakukan melalui penyuluhan dari pihak terkait, yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (58.9%) responden menyatakan tidak pernah diadakan penyuluhan tentang pentingnya kebersihan lingkungan dari pihak dinas kebersihan.

Penyuluhan mengenai pentingnya kebersihan lingkungan sangat diperlukan dalam upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat sehingga semua warga masyarakat mau terlibat secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan mengenai kebersihan lingkungan masih tergolong kurang pada responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Hal ini tercermin dari jawaban-jawaban sebagian besar responden yang menyatakan bahwa penyuluhan tentang pentingnya kebersihan lingkungan masih sangat jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan oleh pihak Dinas Kebersihan.

Lebih dari setengah (58.8%) responden menganggap pemerintah masih tergolong kurang dalam hal penyuluhan kebersihan lingkungan (Gambar 7). Responden yang menilai sedang sebanyak 35.6% dan baik hanya 5.6%. Hal ini menjadi indikasi masih rendahnya peran pemerintah dalam memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga

kebersihan lingkungan. Padahal penyuluhan merupakan salah satu sarana penyampaian pesan edukasi kepada masyarakat yang cukup efektif.

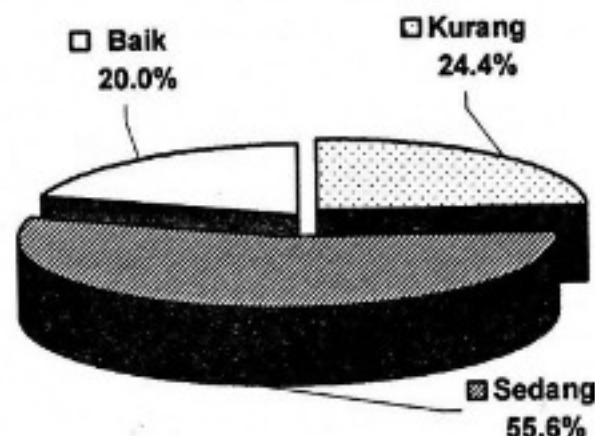


Gambar 7. Sebaran kategori penyuluhan kebersihan lingkungan

Peranan pemerintah untuk memberikan penyuluhan serta bimbingan kepada masyarakat melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota sangat diperlukan agar program kebersihan yang dicanangkan pemerintah dapat terwujud dengan baik. Di samping itu, Dinas Kebersihan dan Penertiban Kabupaten Aceh Barat telah mencanangkan peningkatan penyuluhan dengan memanfaatkan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan alim ulama sebagai langkah strategisnya.

Untuk mengetahui bagaimana kriteria pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan penilaian masyarakat secara umum, dilakukan penjumlahan skor variabel pengelolaan sampah oleh pemerintah. Bentuk pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah adalah penyediaan tenaga pengelola sampah, penyediaan sarana dan prasarana, dan penyuluhan dan pembimbingan tentang kebersihan. Selanjutnya dilakukan pengategorian skor pengelolaan sampah oleh masyarakat menjadi tiga kriteria, yakni kurang, sedang dan baik.

Hasil pengategorian skor pengelolaan sampah oleh pemerintah menunjukkan bahwa lebih dari separuh (55.6%) responden, menilai pengelolaan sampah oleh pemerintah termasuk kategori sedang (Gambar 8). Sisanya, sebanyak 24.4% responden menilai kinerja pengelolaan sampah oleh pemerintah masuk kategori kurang dan 20.0% responden memberikan penilaian baik. Data tersebut mengindikasikan bahwa secara umum pengelolaan sampah oleh pemerintah sudah cukup memadai.



Gambar 8. Sebaran kategori pengelolaan sampah oleh pemerintah

Hubungan Karakteristik Responden dengan Pengelolaan Sampah oleh Masyarakat

Tingkat pendidikan

Pada Tabel 1 terlihat bahwa persentase terbesar responden pada ketiga kategori (kurang, sedang, dan baik) penilaian pengelolaan sampah oleh masyarakat adalah berpendidikan SD. Adanya variasi dalam tingkat pendidikan responden tidak menyebabkan perbedaan kategori pengelolaan sampah oleh masyarakat. Hal ini didukung pula oleh hasil analisis khi kuadrat yang menunjukkan tidak adanya hubungan yang nyata ($p > 0.1$) antara tingkat pendidikan responden dan pengelolaan sampah padat rumah tangga oleh masyarakat. Dengan demikian, pendidikan yang tinggi tidak bermakna bahwa pengelolaan sampah yang dilakukannya juga akan baik, demikian pula sebaliknya.

Tabel 1. Sebaran pendidikan responden berdasarkan pengelolaan sampah oleh masyarakat

Tingkat Pendidikan Responden	Kategori Pengelolaan Sampah oleh Masyarakat							
	Kurang		Sedang		Baik		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Tidak Sekolah	8	22.2	9	16.7	17	18.9	8	22.2
Tamat SD	24	66.7	35	64.8	59	65.6	24	66.7
Tamat SLTP	1	2.8	2	3.7	3	3.3	1	2.8
Tamat SLTA	3	8.3	8	14.8	11	12.2	3	8.3
Total	36	100.0	54	100.0	90	100.0	36	100.0

Nilai P Khi Kuadrat : 0.762 (tidak nyata: $p > 0.1$)

Umur pesponden

Pada Tabel 2 terlihat bahwa responden yang tergolong kurang dalam pengelolaan sampah ternyata berusia muda (< 36 tahun) yakni 47.2%, yang terkategori kurang dalam pengelolaan sampah padat rumah tangga. Responden yang berusia sedang (36 - 49 tahun) tergolong dalam pengelolaan sampah yang sedang dengan persentase sebesar 38.9%. Pada pengelolaan sampah yang tergolong baik terdapat distribusi persentase responden yang merata, yakni masing-masing 33.3% pada semua kelompok umur. Hasil analisis khi kuadrat menunjukkan adanya hubungan yang nyata ($p < 0.1$) antara umur responden dengan pengelolaan sampah padat rumah tangga oleh masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan usia menimbulkan variasi pula terhadap semakin baiknya pengelolaan sampah padat rumah tangga. Responden yang berusia muda masih kurang terlibat dalam pengelolaan sampah jika dibandingkan dengan responden yang berusia sedang dan tua.

Tabel 2. Sebaran umur responden berdasarkan pengelolaan sampah oleh masyarakat

Kategori umur	Kurang		Sedang		Baik		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Muda (< 36 tahun)	17	47.2	13	24.1	30	33.3	17	47.2
Sedang (36 - 49 tahun)	9	25.0	21	38.9	30	33.3	9	25.0
Tua (> 49 tahun)	10	27.8	20	37.0	30	33.3	10	27.8
Total	36	100.0	54	100.0	90	100.0	36	100.0

Nilai P Khi Kuadrat : 0.071 (nyata: $p < 0.1$)

Tingkat pendapatan

Pendapatan merupakan total uang yang diterima rumah tangga dari seluruh anggota rumah tangga yang bekerja dan memperoleh gaji serta dari penghasilan tambahan lain. Selanjutnya pendapatan tersebut yang merupakan pendapatan keluarga dibagi dengan jumlah anggota keluarga sehingga diperoleh pendapatan per kapita. Sebagian besar (41.7%) responden yang tergolong dalam pengelolaan sampah yang rendah termasuk dalam kategori pendapatan rendah (< Rp 143361) pula (Tabel 3). Responden yang tergolong dalam pengelolaan sampah yang baik dan sedang sebagian besar berasal dari pendapatan sedang (Rp 143361 - Rp 317437).

Tabel 3. Sebaran pendapatan responden berdasarkan pengelolaan sampah padat rumah tangga

Kategori pendapatan	Kurang		Sedang		Baik		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Rendah (< Rp 143.361)	15	41.7	16	29.6	31	34.4	15	41.7
Sedang (Rp 143361 - Rp 317437)	13	36.1	24	44.4	37	41.1	13	36.1
Tinggi (> Rp 317437)	8	22.2	14	25.9	22	24.4	8	22.2
Total	36	100.0	54	100.0	90	100.0	36	100.0

Nilai P Khi Kuadrat : 0.498 (tidak nyata : $p > 0.05$)

Hasil analisis khi kuadrat menunjukkan tidak adanya hubungan yang nyata ($p > 0.1$) antara pendapatan responden dengan pengelolaan sampah padat rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian, adanya variasi pendapatan tidak menyebabkan berbedanya pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat.

Jumlah anggota keluarga

Jumlah anggota keluarga sangat menentukan banyaknya sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Dengan semakin banyaknya anggota keluarga, secara kuantitatif sampah diduga juga akan semakin tinggi. Persentase terbesar reponden pada ketiga kategori pengelolaan (kurang, sedang, dan baik) berada pada kelompok jumlah anggota keluarga sedang (4-6 orang) (Tabel 4). Pada Tabel 4 tidak terlihat adanya pola yang linear, jumlah anggota keluarga yang semakin besar tidak berarti pengelolaan sampah padat rumah tangganya akan semakin baik ataupun kurang. Hal ini terlihat pula pada hasil analisis khi kuadrat yang menunjukkan tidak adanya hubungan yang nyata ($p > 0.1$) antara jumlah anggota keluarga dengan pengelolaan sampah oleh masyarakat.

Tabel 4. Sebaran jumlah anggota keluarga berdasarkan pengelolaan sampah oleh masyarakat

Kategori jumlah anggota keluarga	Kurang		Sedang		Baik		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Kecil (< 4 orang)	12	33.3	13	24.1	25	27.8	12	33.3
Sedang (4 - 6 orang)	20	55.6	30	55.6	50	55.6	20	55.6
Besar (> 6 orang)	4	11.1	11	20.4	15	16.7	4	11.1
Total	36	100.0	54	100.0	90	100.0	36	100.0

Nilai P Khi Kuadrat : 0.411 (tidak nyata: $p > 0.1$)

Pengaruh Karakteristik Responden terhadap Peran Pengelolaan Sampah oleh Masyarakat

Hasil analisis korelasi Spearman menunjukkan bahwa variabel karakteristik responden yang berhubungan nyata ($p < 0.1$) dengan pengelolaan sampah padat rumah tangga oleh masyarakat adalah umur responden, dengan nilai korelasi Spearman sebesar 0.194. Hal ini berarti keeratan hubungan di antara umur responden dengan pengelolaan sampah padat rumah tangga oleh masyarakat adalah 19.4% dan arah hubungan di antara keduanya adalah positif nyata ($p < 0.1$). Artinya semakin tua umur responden, perannya dalam pengelolaan sampah akan semakin tinggi pula. Sementara itu, variabel karakteristik lainnya, yakni pendidikan, pendapatan, dan jumlah anggota keluarga, tidak berhubungan nyata dengan pengelolaan sampah oleh masyarakat.

Berbeda dengan hasil analisis korelasi Spearman, hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa dari keempat variabel karakteristik sosial ekonomi responden (umur, pendidikan, pendapatan, dan jumlah anggota keluarga), ternyata pendapatan, dan umur berpengaruh secara nyata ($p < 0.1$) terhadap pengelolaan sampah padat rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat. Secara bersama-sama, keempat variabel karakteristik sosial ekonomi responden berpengaruh nyata dengan nilai *adjusted r square* sebesar 0.126 terhadap pengelolaan sampah. Artinya pengaruh karakteristik sosial ekonomi adalah 12.6% terhadap pengelolaan sampah, sedangkan sisanya (87.4%) adalah pengaruh dari variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini (Tabel 5).

Semakin tinggi tingkat pendapatan responden, pengelolaan sampah padat rumah tangganya akan semakin baik pula. Hal ini sejalan pula dengan semakin tingginya tingkat kesejahteraan penduduk yang akan mempengaruhi jumlah dan pola konsumsinya sehingga jumlah dan kualitas sampah pun akan meningkat pula. Implikasinya adalah pengelolaan sampah yang lebih baik akan sangat diperlukan.

Tabel 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah rumah tangga oleh masyarakat

Peubah Bebas	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Galat			
Konstanta	42.270	3.658		11.556	0.000
Umur	0.051	0.068	0.285	1.756	0.082
Pendidikan	1.109	1.041	0.124	1.065	0.290
Pendapatan	0.001	0.001	0.307	2.635	0.010
jumlah anggota keluarga	0.354	0.455	0.085	0.779	0.438

Peubah tidak Bebas: skor pengelolaan sampah oleh masyarakat
Adjusted R Squar : 0.126

Murray dan Lappin (1967) menyatakan bahwa di antara faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang dalam mengikuti kegiatan di lingkungannya adalah umur dan penghasilan. Individu menengah ke atas cenderung untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di lingkungannya. Individu yang mempunyai pekerjaan tetap cenderung untuk berpartisipasi. Begitu pula dengan penghasilan, semakin tinggi penghasilan semakin banyak partisipasi yang diberikan, sebab jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya cenderung untuk tidak berpartisipasi. Demikian pula dengan semakin

bertambahnya usia akan berimplikasi terhadap semakin aktifnya seseorang dalam lingkungannya khususnya dalam pengelolaan sampah. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan dan pemahaman yang lebih baik akan dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan di sekitarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- (1) Pola pengelolaan sampah pemukiman/sampah rumah tangga yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Meulaboh adalah proses pembuangan sampah secara langsung, yaitu sampah diangkut dari rumah langsung ke TPA (Tempat Pembuangan Terakhir) yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Perda No.2 Tahun 1999. Jumlah truk sampah yang beroperasi adalah 7 buah/hari sehingga hanya 70% sampah yang mampu diangkut oleh armada kebersihan, sedangkan sisanya, yakni 30%, tidak dapat terangkut. Dalam pembuangan akhir sampah metode yang digunakan adalah secara terbuka (*open dumping*) dan kemudian dibakar.
- (2) Peran pengelolaan sampah oleh masyarakat sudah termasuk dalam kategori baik. Salah satu hal yang masih harus mendapat perhatian terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah keikutsertaan dalam rapat/pertemuan mengenai kebersihan lingkungan.
- (3) Peran pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup memadai. Penilaian responden yang masih rendah terkait dengan peran pemerintah adalah masih rendahnya kinerja petugas kebersihan, kurangnya TPS dan tong-tong sampah yang memenuhi syarat, serta intensitas penyuluhan kebersihan lingkungan yang sangat kurang.
- (4) Dari keempat variabel karakteristik sosial ekonomi responden (umur, pendidikan, pendapatan, dan jumlah anggota keluarga), ternyata pendapatan dan umur berpengaruh secara nyata ($p < 0.1$) terhadap pengelolaan sampah padat rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat.

Saran

- (1) Pemerintah Kota Meulaboh perlu menyediakan tempat penampungan sampah sementara yang jumlahnya memadai sesuai jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Namun, Dinas Kebersihan juga harus selalu memonitor dan mengawasi agar tidak terjadi penumpukan sampah pada TPS-TPS yang tersedia. Hal ini juga untuk mengantisipasi daerah-daerah pemukiman yang tidak mampu dijangkau oleh truk pengangkut sampah. Di samping itu, pengadaan tong-tong sampah yang memenuhi syarat juga harus terus diupayakan oleh pemerintah karena sebagian besar tempat sampah yang ada belum memenuhi syarat.
- (2) Penyadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan dapat disosialisasikan melalui penyuluhan oleh Dinas Kebersihan, yang dalam penelitian ini masih sangat jarang dilakukan dinas terkait.
- (3) Pengelolaan sampah khususnya sampah pemukiman/rumah tangga akan berhasil jika ada sanksi yang dikenakan oleh pemerintah kota terhadap orang yang membuang sampah sembarangan.

- (4) Metode pembuangan akhir sampah yang selama ini digunakan, yakni secara terbuka (*open dumping*) dan kemudian dibakar, memiliki kekurangan sehingga sebaiknya diganti dengan metode yang lebih baik seperti *sanitary landfill* yang dampaknya lebih kecil.
- (5) Untuk penelitian selanjutnya perlu dikaji pemanfaatan sampah yang sudah dikelola di TPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, A. 1990. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Mutiara.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat. 2003. Aceh Barat dalam Angka Tahun 2003. Meulaboh.
- [Dinas Kebersihan dan Ketertiban]. 2003. Laporan Tahunan. Dinas Kesehatan dan Ketertiban Aceh Barat. Meulaboh.
- Ihromi, T.O. 1982. Pemanfaatan Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian tentang Wanita. Jakarta.
- [Pemerintah Kabupaten Aceh Barat]. 2002. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebersihan dan Penertiban Kabupaten Aceh Barat.
- Siegel, S. 1988. Statistik Non Parametrik untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Gramedia.